



## A. GAMBARAN UMUM

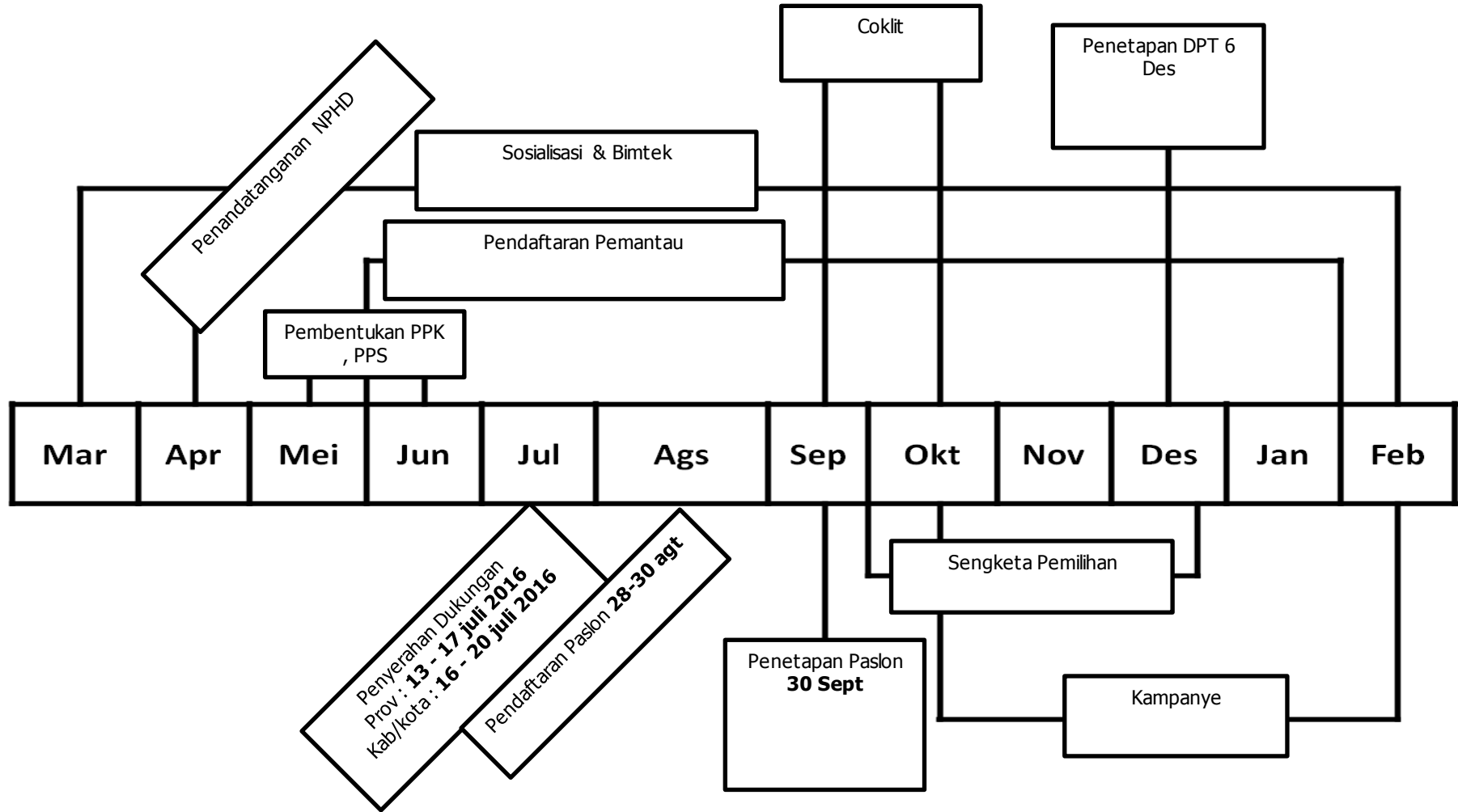
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 101 daerah (7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota).

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 :

- ❖ pencanangan tanggal pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2017 yaitu pada tanggal 15 Februari 2016.
- ❖ penerimaan DAK dan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 14 Juli 2017.
- ❖ KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota saat ini sedang memasuki tahapan Kampanye



# Skema Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2017





## B. ANGGARAN

### Progres Dana Hibah Langsung 2015 & 2017

- 1. Total anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemilihan pada 101 daerah yang telah ditandatangani oleh KPU dan Pemerintah Daerah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp. 4.350.649.323.528,-**
- 2. Pencairan anggaran sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017 sebesar Rp. 3.426.349.822.142,-**
- 3. Sisa anggaran Pemilihan yang belum di transfer oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 699.365.486.170 ,-**



## B. ANGGARAN

Prosentase Transfer Dana Hibah Pemilihan Tahun 2017 dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota per tanggal 25 Januari 2017 adalah :

- a. 10% - 49% sebanyak 14 Satker
- b. 50% - 69% sebanyak 21 Satker
- c. 70% - 89% sebanyak 14 Satker
- d. 90% - 100% sebanyak 52 Satker



## B. ANGGARAN

Pada Tahun 2017 masih terdapat satker yang belum ditransfer sesuai dengan NPHD oleh Pemerintah Daerah dan transfer anggaran dibawah 50% (data per tanggal 25 Januari 2017) antara lain :

No.	Satker	Pagu NPHD (Rp.)	Belum Ditransfer	Prosentasi Transfer
1.	Kota Langsa	14.658.000.000	2.658.000.000	40,93%
2.	Kab. Aceh Utara	66.841.278.468	41.841.278.468	37,40%
3.	Kab. Aceh Timur	34.999.500.000	9.999.500.000	28,5%
4.	Kab. Pidie	33.000.000.000	13.000.000.000	30,30%
5.	Kab. Aceh Barat	20.000.000.000	8.000.000.000	40,00%
6.	Kab. Aceh Tamiang	28.476.990.150	18.476.990.150	35,12%
7.	Kab. Barito Selatan	20.162.242.200	8.389.318.000	33,21%
8.	Kab. Kotawaringin Barat	19.176.568.000	9.176.568.000	37,81%
9.	Provinsi Gorontalo	77.989.407.950	28.056.941.250	46,41%



## B. ANGGARAN

Pada Tahun 2017 masih terdapat satker yang belum ditransfer sesuai dengan NPHD oleh Pemerintah Daerah dan transfer anggaran dibawah 50% (data per tanggal 25 Januari 2017) antara lain :

### Lanjutan (1)

No	Satker	Pagu NPHD (Rp.)	Belum Ditransfer	Prosentasi Transfer
10.	Kab. Buru	19.000.000.000	7.000.000.000	44,74%
11.	Kota Sorong	35.000.000.000	24.000.000.000	31,43%
12.	Kab. Nduga	61.847.000.000	31.847.000.000	48,51%
13.	Kab. Kep. Yapen	41.769.732.100	1.230.000.000	26,33%
14.	Kab. Dogiyai	56.803.560.700	28.401.780.350	49,29%



## B. ANGGARAN

Tabel Daerah yang Baru Menerima Pencairan 50% - 69% (data per tanggal 25 Januari 2017) :

No.	Satker	Pagu NPHD (Rp.)	Belum Ditransfer	Prosentasi Transfer
1.	Kab. Aceh Tenggara	27.914.430.000	8.000.800.000	58,24%
2.	Kab. Aceh Jaya	12.493.108.350	5.493.108.350	56,03%
3.	Kab. Bener Meriah	31.329.328.000	9.470.002.500	57,45%
4.	Kab. Gayo Lues	17.085.960.322	7.085.960.322	58,53%
5.	Kab. Aceh Tengah	27.782.015.384	13.891.007.692	50,00%
6.	Kota Lhokseumawe	15.000.000.000	5.000.000.000	66,67%
7.	Kab. Tapanuli Tengah	27.397.478.000	9.397.478.000	65,70%
8.	Kab. Bengkulu Tengah	15.955.372.000	5.631.218.100	64,56%



## Lanjutan (1)

No.	Satker	Pagu NPHD (Rp.)	Belum Ditransfer	Prosentasi Transfer
9.	Kab. Tulangbawang Barat	15.000.000.000	5.000.000.000	66,67%
10.	Kab. Lembata	22.666.850.730	10.946.919.000	51,71%
11.	Kab. Takalar	16.000.000.000	6.000.000.000	62,50%
12.	Kota Kendari	19.361.723.800	9.214.883.487	52,41%
13.	Kab. Sangihe	24.475.234.866	6.475.234.866	63,33%
14.	Kab. Boalemo	13.000.000.000	6.000.000.000	53,85%
15.	Kab. Halmahera Tengah	13.484.142.000	6.506.761.000	51,75%
16.	Kota Ambon	26.454.932.000	11.454.932.000	55,46%
17.	Kab. Maluku Tenggara Barat	29.885.892.685	9.000.000.000	69,89%
18.	Prov. Papua Barat	506.384.609.000	199.671.448.200	60,57%
19.	Kab. Maybrat	45.000.000.000	15.000.000.000	66,67%
20.	Kab. Lanny Jaya	64.999.957.000	24.999.957.000	61,54%
21.	Kab. Tolikara	69.115.000.000	29.115.000.000	57,87%





# C. Daftar Pemilih

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017 data untuk badan penyelenggara adhock dan daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan sebanyak : 1.802 kecamatan
2. Desa/Kelurahan sebanyak : 21.785 Desa/Kelurahan
3. Tempat Pemungutan Suara sebanyak : 98.259
4. Daftar Pemilih Tetap sebanyak 41.200.058 jiwa yang terbagi
  - a. Laki – laki : 20.696.694 orang
  - b. Perempuan : 20.503.364 orang



# C. Daftar Pemilih

## PERMASALAHAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

Permasalahan utama data pemilih adalah :

Masih terdapat pemilih yang tidak diketemukan data kependudukan didalam database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai contoh data dari Kabupaten Bekasi masih terdapat 6.963 pemilih yang tidak diketemukan di dalam database kependudukan. Adapun sisa sebanyak 89.136 pemilih pada 67 daerah masih dilakukan pemadanan data oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



# D. Pencalonan

1. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan: Tanggal 20 Juli s.d. 24 Oktober 2016;
2. Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada 2017 : 101 daerah meliputi : 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten.
3. Jumlah Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan: 306 paslon meliputi 240 Pasangan calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan 66 Pasangan calon yang berasal dari Perseorangan.
4. Terdapat 9 daerah yang telah menetapkan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Terdapat 44 sengketa pencalonan/pemilihan yang tersebar di 31 daerah.



# E. SENGGKETA

No	Jenis Sengketa	Jumlah Perkara	Jumlah Putusan				
			Dikabulkan	Tidak Diterima	Ditolak	Dicabut	Proses
1.	Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Kabupaten/Kota	15*)	7	0	8	0	0
2.	Sengketa TUN Pemilihan di Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Kabupaten/Kota	30	10	0	20	0	0
3.	Sengketa TUN Pemilihan di PTTUN	20	3	6	9	2	0
4.	Sengketa TUN Pemilihan di MA	10	3	0	5	1	1



## F. KAMPANYE

Pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2017 :

- Dilaksanakan sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017.
- Metode kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik akan dilakukan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 11 Februari 2017.



## F. KAMPANYE

### Jadwal Debat Publik/Debat Terbuka untuk tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh

NO.	PROVINSI	DEBAT I	DEBAT II	DEBAT III
1.	BANTEN	27 Des 2016	25 Jan 2017	9 Feb 2017
2.	DKI JAKARTA	13 Jan 2017	27 Jan 2017	10 Feb 2017
3.	ACEH	22 Des 2017	11 Jan 2017	1 Febr 2017
4.	PAPUA BARAT	20 Jan 2017	2 Feb 2017	
5.	GORONTALO	22 Des 2017	12 Jan 2017	24 Jan 2017
6.	BANGKA BELITUNG	11 Jan 2017	4 Feb 2017	
7.	SULAWESI BARAT	11 Jan 2017	29 Jan 2017	9 Feb 2017



## TIME SCHEDULE LOGISTIK Pilkada

# G. LOGISTIK

### TAHAPAN LOGISTIK PILKADA

← 2016  
23 Januari  
2017

Pengadaan, Sortir/Lipat,  
Pengepakan dan Pengiriman  
Logistik

2017 →

Sept

Okt

Nov

Des

Jan

Peb

15 Februari  
2017

**PILKADA**

1. Memeriksa dan menginventarisasi kembali logistik Pilkada yang akan digunakan, misalnya jumlah Kotak sesuai jumlah TPS
2. Mengadakan logistik yang kurang/rusak (jika diperlukan)
3. Melakukan pensortiran, pengesetan, inventarisasi, pengepakan dan penyimpanan logistik Pilkada sesuai SOP yang ditetapkan
4. Koordinasi dengan PPK dan PPS bahkan dengan Panwaslu dan Pihak Kepolisian untuk proses distribusinya
5. Mendistribusikan logistik sesuai dengan prioritas lokasi dan memastikan pengiriman distribusi terlaksana dengan baik hingga di tingkat TPS pada H-1
6. Memberikan pemahaman kepada PPK, PPS, dan KPPS melalui KPU Kab/Kota terkait jenis, jumlah, dan peruntukan logistik Pilkada dimaksud
7. Melaporkan perkembangan pergerakan logistik Pilkada yang didistribusikan ke KPU melalui KPU Provinsi



## PENGADAAN KATALOG LOGISTIK

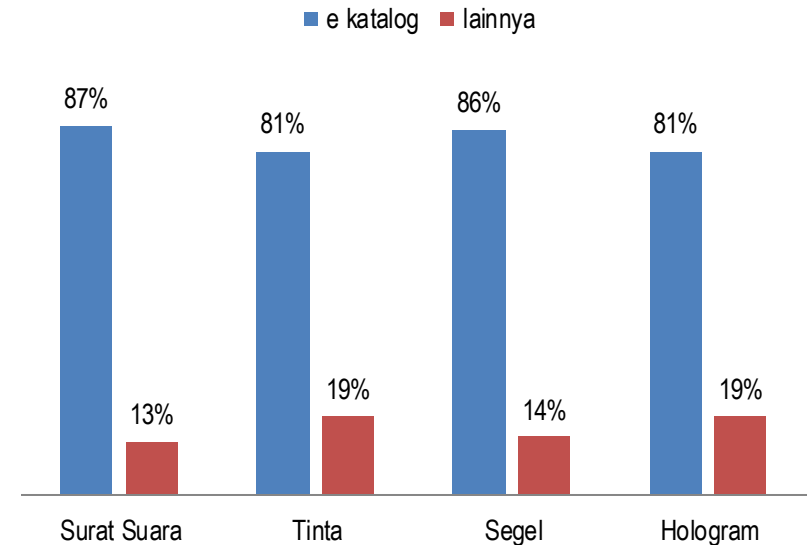
# G. LOGISTIK

### PEMILIHAN GUBERNUR

	Surat Suara	Tin Sege ta 1	Hologram
Provinsi Aceh	EK	EK	EK
Provinsi Kep. Bangka Belitung	EK	EK	EK
Provinsi Banten	EK	EK	EK
Provinsi DKI	EK	EK	EK
Provinsi Sulawesi Barat	EK	EK	EK
Provinsi Gorontalo	LS	PL	EK
Provinsi Papua Barat	EK	EK	EK

### PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA

#### Metode Pengadaan Logistik



1. Secara umum, satker Kab/Kota sangat antusias dengan metode pengadaan melalui Katalog, hal tersebut terlihat dari jumlah satker yang melaksanakan pengadaan tersebut, lebih dari 80%
2. Pengadaan lainnya diantaranya adalah pengadaan langsung, lelang cepat, lelang sederhana, lelang umum



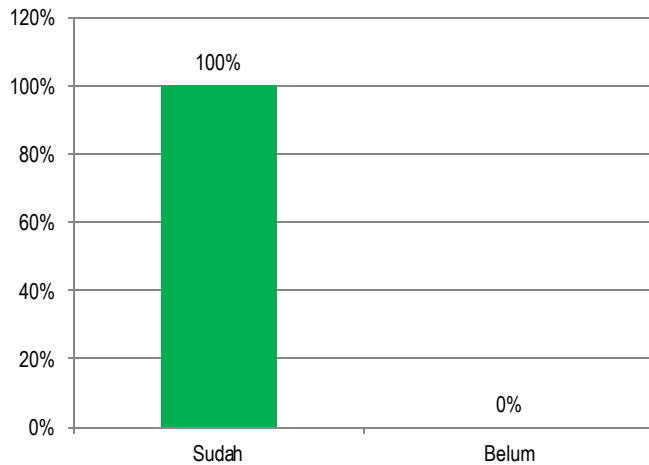


## PERKEMBANGAN LOGISTIK PILKADA

# G. LOGISTIK

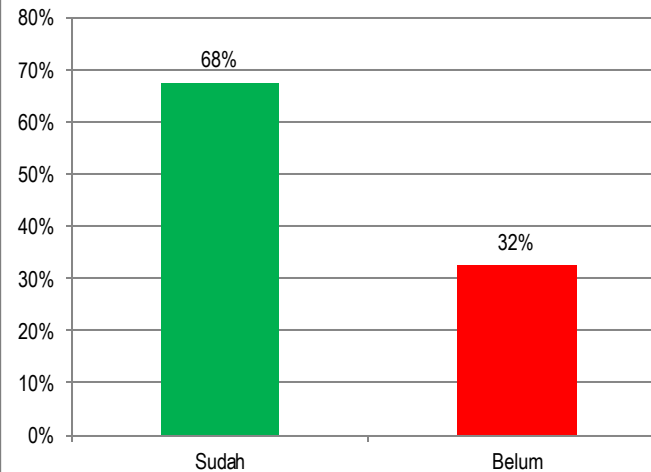
### Tahap Proses Pengadaan Logistik

■ Sudah ■ Belum



### Tahap Proses Produksi Logistik

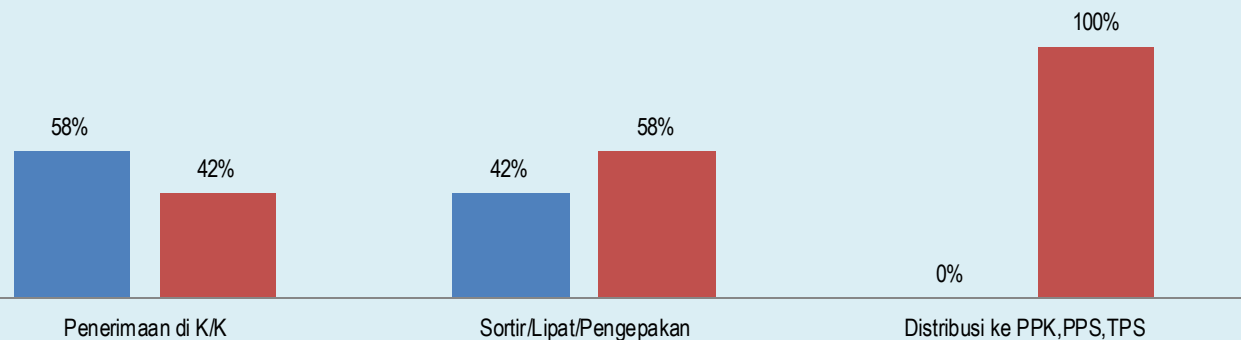
■ Sudah ■ Belum



1. Satker KPU/KIP Kabupaten/Kota pada minggu ini sebagian besar dalam tahap penerimaan logistik dan permintaan kekurangan ke pihak penyedia
2. Minggu depan, akan dilakukan proses pengepakan ke Kotak Suara untuk disimpan sebelum di distribusikan ke tingkat PPK, PPS dan TPS

### Tahap Logistik Pilkada

■ Sudah ■ Belum



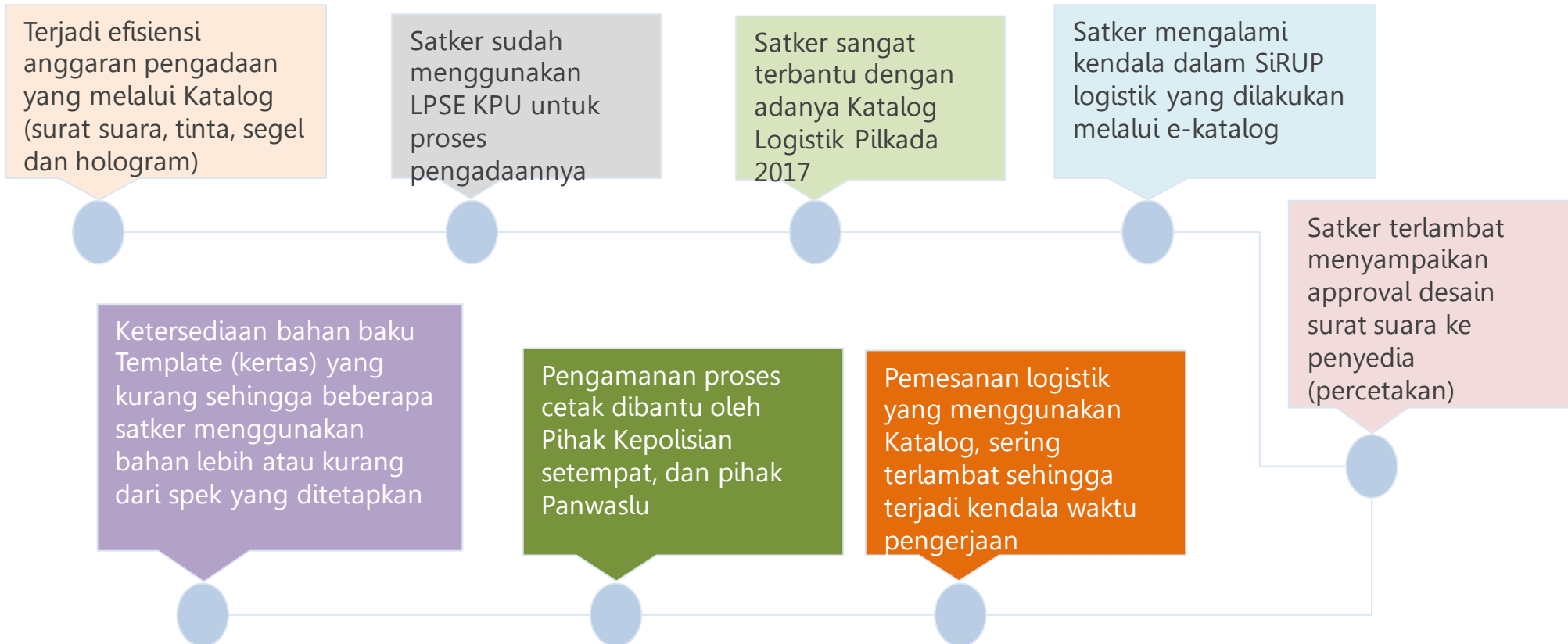
Sumber :

Biro Logistik, 27 Januari 2017



## DINAMIKA LOGISTIK PILKADA 2017

# G. LOGISTIK



*KPU melalui tim posko Logistik Pemilihan 2017, memantau secara rutin setiap hari laporan perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh satker yang melaksanakan Pemilihan sehingga mampu diminimalisir dan diantisipasi secara cepat permasalahan tersebut.*



Secara umum, tidak banyak kendala yang dihadapi oleh KPU dalam mempersiapkan logistik Pemilihan 2017. Mengingat berbagai upaya telah dilakukan dalam persiapannya, diantaranya:

- 1) Supervisi dan monitoring secara intens dalam memberikan paparan kebijakan logistik oleh KPU kepada satker yang melaksanakan Pemilihan 2017
- 2) Pengadaan logistik untuk Surat Suara, Tinta sidik jari, Segel, dan Hologram melalui E-Katalog sehingga memberikan kemudahan satker dalam mengadakan logistik dimaksud (tidak perlu lelang namun langsung beli di katalog LKPP)
- 3) KPU secara periodik melakukan koordinasi terkait perkembangan proses pengadaan dan pengiriman logistik sehingga dapat diantisipasi lebih awal terhadap kesalahan yang terjadi
- 4) Sumber pembiayaan (hibah APBD) yang diregister ke dalam APBN (DIPA KPU) dimasukkan ke dalam satu akun (MAK) sehingga memudahkan dalam teknis penggunaanya
- 5) Koordinasi yang baik antara satker dengan Pihak Panwas dan Pihak Kepolisian dalam mengawal proses logistik



Beberapa kendala kecil yang dihadapi oleh KPU, diantaranya :

- 1) Proses pemesanan melalui Katalog oleh satker masih lamban sehingga penyedia mengalami ekstra pengerjaan dalam produksinya, hal ini akan berdampak kepada terlambatnya pengiriman logistik ke Kabupaten/Kota
- 2) Perubahan jumlah paslon akibat sengketa, berdampak kepada proses pengadaan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama (proses pengadaan dr awal bukan melalui Katalog, khususnya untuk Surat Suara)
- 3) Lambatnya laporan perkembangan logistik ke tingkat Pusat memberikan dampak kepada kurangnya antisipasi terhadap permasalahan yang terjadi di tingkat satker, karena disibukkan dengan kegiatan pengelolaan logistik Pemilihan (minim SDM)
- 4) Penetapan DPT oleh satker yang terlambat dari jadwal tahapan yang ditetapkan berdampak kepada proses produksi surat suara



# H. SOSIALISASI

## 3 (tiga) strategi yang dilakukan KPU dalam proses sosialisasi :

- 1. Tatap muka dan komunikasi massa,**  
bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara;
- 2. Sosialisasi lewat Media,**  
seperti memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak dan elektronik
- 3. Membentuk relawan demokrasi,**  
strategi ini melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal dan penyandang disabilitas serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.



# I. PENGAMANAN

**Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di 101 daerah merupakan sebuah kegiatan demokrasi yang bersifat kontestasi, karena sifatnya kontestasi maka akan ada kemungkinan menimbulkan konflik antar pendukung pasangan calon.**

**KPU bekerjasama dengan jajaran pengamanan untuk dapat membantu KPU dalam hal pengamanan proses pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2017.**

TERIMA  
KASIH!